

Minggu Pagi, Kualitas Udara DKI Terburuk Ketiga Se-Indonesia

JAKARTA (IM) - Kualitas udara di Jakarta menempati posisi ketiga terburuk di Indonesia pada Minggu (27/8) pagi. Dikutip dari laman IQAir pukul 06.00 WIB, US air quality index (AQI US) atau indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 169.

Berdasarkan tingkat polusi, DKI Jakarta masuk kategori tidak sehat. Kualitas udara tidak sehat ini diprediksi bakal terjadi sampai 29 Agustus 2023 atau lima hari ke depan.

Konsentrasi polutan tertinggi dalam udara DKI Jakarta pada Minggu (27/8) pagi mencapai 2.5. Angka tersebut 18.2 kali nilai panduan kualitas udara tahunan World Health Organization (WHO).

Cuaca di Jakarta pada

Minggu pagi ini berkabut dengan suhu 27 derajat celsius, kelembapan 80 persen, gerak angin 1.1 km/h, dan tekanan sebesar 1011 milibar.

Selain menginformasikan tingkat polusi, situs IQAir juga merekomendasikan masyarakat untuk mengenakan masker, menghidupkan penyanggah udara, menutup jendela, dan hindari aktivitas outdoor. Tujuannya agar masyarakat dapat terhindar dari udara luar yang kotor.

Sebagai informasi, kota dengan tingkat kualitas udara terburuk di Indonesia ditempati Depok, Jawa Barat, dengan indeks 198. Lalu, kota dengan kualitas udara terburuk kedua di Indonesia adalah Tangerang Selatan, Banten, dengan indeks 183. ● osm

Anggota DPRD DKI Kritik Rusaknya Jembatan Tebet Eco Park

KEBONSIRIH (IM) - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta F-PKB Hasbiullah Ilyas mengkritik perawatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI atas jembatan kayu di kawasan Tebet Eco Park yang kini rusak parah.

“Seharusnya Pemprov itu sudah bisa mengantisipasi sebelum kejadian, ini kan kebiasaan Pemprov selalu kejadian baru bertindak, tidak ada antisipasi sama sekali dari Pemprov,” kata Hasbiullah kepada wartawan, Sabtu (26/8).

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta ini mengatakan kualitas jembatan kayu itu seharusnya diperhitungkan sebelum dibangun. Ia menilai pekerjaan yang dilakukan tidak maksimal.

“Seharusnya kekuatannya sudah harus ada (perhitungan kualitasnya) sebelum dibangun. Inilah kebiasaan Pemprov itu kerja fisik selalu di akhir, di akhir tahun yang mengakibatkan tidak maksimal,” katanya.

Perawatan fasilitas publik, tambah Hasbiullah, harus dilakukan Pemprov DKI secara berkala. Jaditidak ada

fasilitas yang rusak parah. “Ya nggak ada perawatan, kalau ada perawatan tidak mungkin terjadi seperti ini. Seharusnya 3 bulan sekali atau 6 bulan itu ada evaluasi, dilihat. Ini rusak baru diperbaiki,” tutur Ketua DPW PKB DKI Jakarta ini.

“Semua proyek fisik di DKI Jakarta itu kejar target semua di akhir, di akhir masa anggaran. Kita bilang kejar target tadi, sekarang baru bekerja, baru antisipasi untuk mengejar supaya penerapan anggaran bagus,” lanjutnya.

Diketahui, jembatan kayu di area Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, dalam kondisi rusak. Kini jembatan itu ditutup untuk proses perbaikan.

Pantauan detikcom di lokasi pukul 14.40 WIB, Jumat (25/8), terlihat semua akses masuk ke jembatan itu telah ditutup. Terdapat sebuah spanduk untuk menutup akses ke jembatan itu.

“Mohon maaf kenyamanan Anda terganggu karena sedang ada kegiatan pemeliharaan,” demikian tertulis dalam spanduk tersebut. ● ber

22 Bus Listrik Transjakarta Beroperasi Mulai Oktober 2023

JAKARTA (IM) - Sebanyak 22 bus listrik Transjakarta akan beroperasi mulai Oktober 2023. Dengan demikian, saat ini ada 100 bus listrik Transjakarta yang akan dioperasikan. Pengadaan bus listrik Transjakarta juga akan dilakukan pada 2024.

“Total nanti ada 100 (bus listrik Transjakarta). Di 2024, nanti juga bertambah terus (pengadaan bus listrik),” tutur Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, saat ditemui di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Minggu (27/8).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya memang menargetkan pengadaan 100 unit bus listrik pada tahun ini untuk dioperasikan PT Transjakarta.

“Target kami tahun ini ada sebanyak 100 unit bus listrik yang akan dioperasikan oleh PT Transjakarta sebagai upaya untuk mendorong elektrifikasi di layanan angkutan umum,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Syafrin Liputo dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Jumat (11/8) lalu.

Diharapkan, dengan bertambahnya armada bus ini, masyarakat yang sehari-hari masih menggunakan transportasi pribadi, bisa mulai berpindah ke transportasi umum massal termasuk bus listrik.

“Harapannya ada kesadaran masyarakat untuk mulai beralih dan menggunakan layanan angkutan umum massal yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.

menggunakan layanan angkutan umum massal yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.

Pada Januari 2023, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta saat itu, Anang Rizkani Noor, berujar, PT Transjakarta, menyebutkan akan ada 70 bus listrik masih tertahan di Tiongkok. Puluh bus ini termasuk dalam pengadaan bus listrik pada 2020.

BUMD DKI Jakarta itu telah menerima 30 bus listrik dari Tiongkok. Sedangkan 70 bus listrik masih tertahan karena pemerintah Tiongkok menerapkan penutupan sementara (*lockdown*) Covid-19.

“Bus listrik itu target 100 (unit) di tahun 2022 pengadaannya selesai, sudah diadakan. Tapi yang dari 100 (unit) itu yang beroperasi baru 30,” sebut Anang kepada awak media pada 15 Januari 2023 lalu.

“Yang 70-nya tertunda sampai di Indonesia karena di Tiongkok sedang lockdown,” katanya.

Puluh bus listrik yang tertahan di Tiongkok rencananya tiba di Tanah Air sekitar Februari-Maret 2023. Setibanya di Indonesia, kata Anang, 70 bus itu tak akan langsung dioperasikan semua. Pengoperasian bus-bus listrik itu dilakukan secara bertahap.

“(Operasional 70 bus) enggak langsung semua, brek, gitu ya. Bertahap,” ujarnya. ● ber

4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



OPERASIONAL LRT JABODEBEK

Kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) melintas di jalur LRT Jabodebek Stasiun Cawang, Jakarta, Minggu (27/8). LRT yang melayani daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi tersebut akan resmi beroperasi secara komersial pada Senin 28 Agustus 2023

Usulan Ganjil Genap Jadi 24 Jam Dinilai Bertentangan dengan Kepentingan Publik

Penerapan ganjil genap 24 jam di DKI Jakarta dinilai tidak efektif untuk menekan polusi udara, dan bertentangan dengan kepentingan publik.

JAKARTA (IM) - Usulan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ida Mahmudah, agar pembatasan kendaraan ganjil genap diperpanjang jadi 24 jam, kandas sudah. Usulan itu justru dinilai bertentangan dengan kepentingan publik.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pastikan tidak akan menerapkan peraturan ganjil genap selama 24 jam penuh untuk menangani polusi udara Ibu Kota.

“Saya tidak akan menambah ganjil genap untuk 24 jam,” tegasnya, di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Minggu (27/8).

Menurutnya, penerapan ganjil genap 24 jam dianggap akan bertabrakan dengan aktivitas masyarakat. Sebab, warga Ibu Kota kini sudah terbiasa dengan penerapan ganjil genap pada waktu-waktu tertentu saja.

“Kalau ganjil genap ditambah, tentunya kegiatan masyarakat di luar, yang sekarang, itu akan sulit,” sebut Heru.

“Misalnya dia malam hari, mau mengantar anaknya (yang) sakit, melintas atau pas di lokasi ganjil genap, kan susah,” katanya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, sebelumnya menyebut, penerapan ganjil genap 24 jam di DKI Jakarta tidak efektif untuk menekan polusi udara.

“Kalau menurut saya ini tidak efektif. Mau 25 jam belum bisa batasi kendaraan buat tekan polusi,” ujar Trubus saat dihubungi, Sabtu (26/8).

Penerapan ganjil genap 24 jam itu justru menambah jumlah kendaraan di Ibu Kota. Masyarakat yang memiliki uang lebih memilih membeli kendaraan lagi.

“Kalau ganjil genap (24

jam) itu masyarakat bisa mengalah dengan membeli kendaraan baru lagi,” kata Trubus.

Trubus menyebut ganjil genap baru efektif jika kebijakannya diterapkan secara serentak oleh wilayah pe-

nyangga Ibu Kota yakni Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Tidak efektif karena pemberlakuannya hanya di Jakarta saja. Itu harusnya diberlakukan di wilayah penyangga, wajib,” kata Trubus. ● osm

KUALITAS UDARA JAKARTA BURUK KPBB akan Gugat Pemerintah dan Industri Atas Kerugian Dampak Pencemaran Udara

JAKARTA (IM) - Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) akan menggugat pemerintah dan industri atas kerugian yang dialami masyarakat akibat pencemaran udara.

Gugatan itu akan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat berdasarkan Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Seegera (ke PN) Jakpus). Mudah-mudahan dalam waktu dua minggu ini,” kata Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safurudin kepada wartawan saat ditemui di kawasan Car Free Day (CFD) Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/8).

Pemerintah dan industri dianggap menyebabkan pencemaran udara yang semakin buruk dalam beberapa waktu belakangan ini. Masyarakat mengalami kerugian materiil karena banyak yang jatuh sakit, terutama gangguan pernapasan.

“Dari hasil riset, masyarakat harus membayar biaya rumah sakit hingga Rp 51,2 triliun,” ujar Ahmad.

Rencananya, KPBB akan mengumpulkan korban dari pencemaran udara ini. Nantinya, bukti yang akan diajukan

ke pengadilan adalah rekam medis beserta kwitansi pembayaran dari rumah sakit, klinik, atau puskesmas.

“Dari rekam medis akan diketahui kira-kira dia membayar berapa. Sifat gugatannya juga perwakilan, yang memang tak berisi seluruh warga yang terdampak,” katanya.

“Dua orang juga sudah bisa mewakili, tapi nanti kami usahakan semakin banyak yang melakukan gugatan tersebut,” kata Ahmad.

Saat ini, Ahmad mengklaim 50 orang dari kawasan Jabodetabek yang telah mendaftar untuk melakukan gugatan tersebut. Nantinya, terdapat terdiri dari perusahaan yang menyebabkan pencemaran udara.

Selain itu, KPBB juga akan menggugat para pihak yang berperan dalam penindakan pencemaran ini. Berdasarkan keterangannya, selain menggugat industri, KPBB akan menggugat antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PLN karena dianggap melakukan pembiaran.

“Pembiaran dalam konteks untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu juga bentuk pidana, ya,” imbuh Ahmad. ● osm

Remaja Injak Leher Remaja di Lenteng Agung Ditetapkan Anak Berhadapan dengan Hukum

JAKARTA (IM) - Dua remaja berinisial MFA (15) dan Z (15) yang menganiaya FSD (16) di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, ditetapkan sebagai anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum (ABH). Status ini setara dengan tersangka bagi pelaku dewasa.

Wakil Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yossi menjelaskan, dalam sistem peradilan anak, pelaku tidak disebut tersangka.

“Terhadap anak MFA dan anak Z, kami sudah lakukan pemeriksaan dalam kategorinya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum,” jelas Yossi saat dikonfirmasi, Sabtu (26/8).

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan

tindak pidana. Ini merujuk Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Sekarang kami sedang melengkapi alat bukti untuk pemberkasan lebih lanjut,” jelas Yossi.

Penganiayaan terhadap FSD terjadi pada Sabtu (19/8) lalu sekitar pukul 16.30 WIB. Mulanya, MFA dan Z melintas di gang dengan mengendarai motor secara berboncengan. Kemudian, FSD mengikuti pelaku tepat di belakangnya menggunakan motor matik.

Pelaku MFA lantas menghampiri korban yang tengah memarkirkan motornya. Seketika, MFA membanting lalu mencekik korban. Tak berhenti sampai di situ, MFA kemudian menginjak batang leher FSD dengan kaki kanannya. ● ber

Dirut KAI Harap Masyarakat Beralih ke LRT Kurangi Polusi Udara di Jakarta

KUNINGAN (IM) - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo berharap moda transportasi LRT menjadi favorit warga untuk mengurangi dampak polusi di Jakarta. LRT Jabodebek mulai diujicobakan untuk publik pada Minggu (27/8).

“Pengoperasian sudah kita siap semua, dan pengecekan-pengecekan yang dilakukan sampai hari ini so far berjalan dengan baik,” kata Didiek saat ditemui di Stasiun LRT Dukuh Atas, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (27/8).

Didiek menyebut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sudah menjajal LRT ini sebelum diresmikan oleh Presiden

Joko Widodo (Jokowi) besok. Ia berharap masyarakat bisa beralih menggunakan LRT untuk mengurangi polusi udara.

“Harapannya, dengan LRT Jabodebek ini, masyarakat beralih moda transportasi yang naik motor, naik kendaraan, beralih ke LRT. Sehingga polusi yang sekarang, yang menjadi viral, jadi Jakarta sebagai kota yang paling polusinya ini, kita bisa kurangi dengan para pelanggan, masyarakat, beralih ke LRT,” ucap Didiek.

Komika Kiky Saputri untuk pertama kali menjajal moda transportasi LRT. Ia mengaku senang dengan fasilitas yang diberikan kepada penumpang.

“Hari ini aku senang

banget karena kesempatan pertama aku, perdana, ikut bareng-bareng sama keluarga besar BUMN untuk mencoba LRT Jabodebek ya. Itu pengalaman seru banget karena bisa merasakan kenyamanannya, kecepatannya, smooth juga dan seru banget,” ujar Kiky.

Menurutnya, publik wajib mencoba moda transportasi yang satu ini. Ia bahkan ingin menjadikan LRT sebagai transportasi alternatif ke tempat kerja.

“Wajib dicoba, salah satu upaya mengurangi polusi pastinya. Karena kalau misalnya nanti macet di jalan, aku dari rumah menuju ‘Lapor Pak’, kayaknya pake LRT aja, ha-ha-ha...,” imbuh Kiky. ● osm



PAWAI BUDAYA REOG PONOROGO

Seniman mementaskan Reog Ponorogo dalam pawai budaya Reog Ponorogo di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Minggu (27/8). Pawai tersebut digelar sebagai upaya mendorong pengusulan dan pengakuan Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dari UNESCO yang bakal disidangkan pada tahun depan.

FOTO: ANTARA